



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



RENJA AKHIR TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat-Nya sehingga kami dapat membuat dan menyampaikan Rencana Kerja Akhir (Renja) Tahun 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Rencana Awal Renja ini merupakan pedoman terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan yang telah ditentukan. Adapun penyusunan Rencana Kerja Awal Tahun 2026 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang memuat kebijakan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Akhir Renja Tahun 2026 ini masih banyak kekurangan maupun kelemahan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Tabanan, Juli 2025
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan,



Dra. Ni Wayan Mariati,MM
NIP. 19680926 199403 2 008
Pembina Utama Muda (IVc)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Tabanan.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta menyiapkan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Akhir OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

Renja Awal OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melaksanakan tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintah dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Dalam Tahun 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 49 Tahun 2012 Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah.
- c. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 tahun 2014 tentang Uraian jabatan Struktural Perangkat Daerah.
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2024
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
- f. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Akhir Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan pedoman/gambaran tentang perencanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2026 dan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Bupati, guna pencapaian target urusan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tujuannya adalah Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Alami dan Terwujudnya Keluarga Berkualitas

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mengajukan usulan program sebanyak 4 dan kegiatan sebanyak 13.

Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Daerah dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan peralatan rumah tangga
- c. Penyediaan bahan logistik Kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan/material
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Kegiatan Pengadaan Baran Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengendalian Penduduk

- Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan dan Pemerintahaan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
 - c. Pengolahan data Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Dengan Sub Kegiatan:
 - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakholder dan Mitra Kerja
 - b. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinas Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- b. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Dengan Sub Kegiatan:

- c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan usaha Peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA)
 - b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA.
- Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
 - a. Penguatan kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Sert Organisasi Kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga BKB, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS
 - b. Pemantauan Data dan Informasi keluarga Berisiko stunting termasuk remaja calon pengantin /calon PUS ibu hamil, pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN TABANAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2						Pemkab Tabanan									
2	08					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabanan									
2	08	1	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	80 %	70,05 %	80%	80%	100%	80%	80%	100%
2	08	1	1	1	1	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	80 %	70,05 %	80%	80%	100%	80%	80%	100%
2	08	1	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran	82 %	80 %	80%	80%	100%	80%	82%	100%

							tugas fungsi OPD										
2	08	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK)	Jumlah jenis sapras yang diadakan	4 jenis	80 %	80%	80%	100%	80%	80%	100%		
2	08	1	1	2	3	Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis sarana dan prasarana kantor yang diadakan	2 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	1	1	2	4	Pembangunan Gedung Kantor (Garase)	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	1 jenis	0	0	0	0	0	0	0		
2	08	1	1	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase serapan anggaran sesuai target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	1	1	3	1	Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen saking tersedia	3 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	1	1	3	2	Kegiatan Pendataan aset	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	1	1	15		Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	73 %	70,05%	72,30%	72,30%	100%	73,00%	73%	100%	100%	100%
2	08	1	1	15	1	Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Pasangan Usia subur miskin yang terlayani KB	175 akseptor	100%	175 Akseptor	100%	100%	100%	100%	75 akseptor	100%	
2	08	1	1	15	2	Kegiatan Bimtek Keluarga Berencana	Penurunan jumlah unmened 5%	133 desa	100%	133 desa	100%	100%	100%	100%	133 desa	100%	
2	08	1	1	15		Kegiatan pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK KELUARGA BERENCANA)	Tersedianya 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Kerambitan	1 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	1	1	15	3	Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK)	Meningkatnya jumlah sasaran penggerakan pelayanan KB	10 Kec.	0	100%	100%	69,54%	100%	99,62%	100%		

2	08	1	1	15	4	Kegiatan Pelatihan Pelaporan Data Keluarga Berencana dan Keluarga	Jumlah dokumen laporan data	110 orang.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	15	5	Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapat Bintek / Pendampingan	5 klp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	15	9	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon	Jumlah faskes KB yang mendapatkan alokon	40 faskes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	74,50%	74,50%	75,00%	75,00%	100%	75,00%	75,00%	100%
2	08	1	1	16	1	Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pengetahuan sikap prilaku remaja tentang KRR	120 or	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	16	2	Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan	Meningkatnya Pengetahuan Pendewasaan Usia Perkawinan								
2	08	1	1	17		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)	87,10%	87,10%	88,75%	88,75%	100%	88,90%	88,90%	100%
2	08	1	1	17	1	Kegiatan Bimtek Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatkan pengetahuan kader dan kelompok BKB di Kab. Tabanan	10 klp	100%	100%	100%	100%	100%	10 klp	100%
2	08	1	1	17	2	Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB	Meningkatkan pergerakan aparat desa dan PLKB di bidang program KKBPK di Kampung KB	100 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100 orang	100%
2	08	1	1	17	3	Advokasi PPKBD dan Institusi Masyarakat Pedesaan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Kader	133 kader	100%	100%	100%	100%	100%	133 kader	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun sub urusan dari urusan wajib yang menjadi kewenangan bersama antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Keluarga Sejahtera
4. Pengelolaan Penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Penyuluh KB (PKB/PLKB)

Sedangkan lingkup pelayanan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan terdiri atas :

1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan yang mencakup Seksi Advokasi dan Pergerakan, Seksi Penyuluhan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2. Bidang Keluarga Berencana yang mencakup Seksi Pengendalian Distribusi Alokasi, Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Seksi Pembinaan Kesertaan KB
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mencakup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia serta Seksi Bina Ketahanan Remaja

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				1 8
1	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	-	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100 %	100%	100%	100%	
2	Presentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta Kb Aktif			79%	79%	80 %	81%	85%	85%	80%	85%	90%	90 %	90%	90%	90%	
3	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa			77%	77%	79 %	81%	83%	85%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%9	
4	Presentase Keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga			76%	76%	77 %	78%	80%	80%	85%	90%	95%	95 %	95%	95%	95%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan adalah melakukan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas Otonomi, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengendalian di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- b. Perumusan kebijakan teknis pengendalian di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan, pengendalian penduduk penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan
- e. Pembinaan PKB/PLKB
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan

Hasil analisa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026 ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi, sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2026 :

1. Capaian Indikator kinerja untuk laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang ditargetkan 1% pada Tahun 2026 , realisasi sebesar 0,33 pada Tahun 2024
2. Capaian Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR) pada Tahun 2026 ditargetkan 2 %, realisasi 1.78 Tahun 2024

3. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB ditargetkan 100% pada Tahun 2026, terealisasi 70% Tahun 2024
4. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2026 sebesar 80 %, realisasi 80% pada Tahun 2024
5. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk ditargetkan 57 pada Tahun 2026, realisasi 55 pada Tahun 2024
6. Capaian Indikator Kinerja jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ditargetkan 16 pada Tahun 2026, realisasi 12 pada Tahun 2024
7. Capaian Indikator Kinerja pada jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan ditargetkan 50 pada Tahun 2026, realisasi 16 pada Tahun 2024
8. Capaian Indikator Kinerja rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2026 sebanyak 2 orang, realisasi 1,78% orang pada Tahun 2024
9. Capaian Indikator Kinerja angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 ditargetkan 67,102% di Tahun 2026, realisasi sebesar 66,23 pada Tahun 2024
10. Capaian Indikator Kinerja Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) ditargetkan 192 pada Tahun 2026, realisasi 174 pada Tahun 2024
11. Capaian Indikator Kinerja Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun ditargetkan 0,27 pada Tahun 2026, realisasi 0,29 Tahun 2024
12. Capaian indikator Cakupa Pus yang ingin ber KB tidak

terpenuhi (unmetneed) pada Tahun 2026 ditargetkan 4,5% realisasi 9,14 pada Tahun 2024.

13. Capaian Indikator Kinerja prosentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ditargetkann 4,98 Tahun 2026, realisasi 41,77 Tahun 2024

14. Capaian Indikator Kinerja Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi ditargetkan 83,16% pada Tahun 2026, realisasi 98,80% Tahun 2024

15. Capaian Indikator Kinerja Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB ditargetkan 93,95% pada Tahun 2026, realisasi 100% Tahun 2024

16. Capaian Indikator Kinerja Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB ditargetkan 89,73 Tahun 2026, realisasi 100% Tahun 2024

17. Capaian Indikator Kinerja Cakupan anggota Bina keluarga Lansia (BKL) ber-KB dianggarka 86,73% pada Tahun 2026, realisasi 100% pada Tahun 2024

18. Capaian Indikator Kinerja Pusat pelayanan Keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan ditargetkan 1 pada Tahun 2026, realisasi 1 pada Tahun 2024

19. Capaian Indikator Kinerja Cakupan remaja dalam puat informasi dan konseling remaja/mahasiswa ditargetkan 15 pada tahun 2026, realisasi 16 pada tahun 2024

20. Capaian Indikator Kinerja Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk ditargetkan 100 pada tahun 2026, realisasi 100 tahun 2024

21. Capaian Indikator Kinerja Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKb mandiri ditargetkan 92,94% di Tahun 2026, realisasi 66,78 pada Tahun 2026

22. Capaian Indikator Kinerja Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan dianggarkan 01.01 pada Tahun 2026 , realisasi 01.01 pada Tahun 2024

23. Capaian Indikator Kinerja Cakupan ketersediaan dan

distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat ditarget 8,56 pada Tahun 2026, realisasi 8,56 Tahun 2024

24. Capaian Indikator Kinerja rata-rata usia kawin pertama wanita ditargetkan 25 Tahun 2026, realisasi 22,3 Tahun 2024

25. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pembiayaan program kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDDES ditargetkan 20 % pada Tahun 2026, realisasi 4% Tahun 2024

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, terhadap pencapaian program Kabupaten, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals):

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang difokuskan pada **Pemerataan Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah di Kabupaten Tabanan.**

Dari lima misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan fokus pada misi pertama yaitu Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan sosial. Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi.

Adapun Indikator Capaian Kinerja Tahun 2026 yang diinginkan pada aspek layanan umum:

- a. Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk adalah 78%
- b. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga adalah 8,56%

Atas isus-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh setiap OPD penanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2026 sebanyak 4 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Untuk tabel review terhadap Renja Akhir RKPD tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan seperti berikut:

Tabel II.3

Review terhadap Renja Akhir RKPD tahun 2025 Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	5.175.956.700,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 tahun	5.175.956.700,00	
2.	Program Pengendalian Penduduk Kegiatan: 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%	259.400.000,00	Program Pengendalian Penduduk Kegiatan: 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	-	285.000.000,00	

3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal. 2. Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kab. Tabanan	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	77%	2.904.533.000,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kab. Tabanan	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	77 %	4.557.226.500,00	
----	---	--------------	---	-----	------------------	---	--------------	---	------	------------------	--

4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tabanan	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	78%	1.721.000.000,00	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tabanan	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	78%	2.702.148.000,00	
---	---	--------------	---	-----	------------------	---	--------------	---	-----	------------------	--

2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan

Program/kegiatan yang direncanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2026 dengan memperhatikan dan melakukan penelahaan berbagai kebutuhan dari berbagai usulan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dapat diakomodir dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
Sub kegiatan Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB dan Advokasi PPKBD dan Institusi Masyarakat Pedesaan di Tingkat Kecamatan
- 2. Bidang Keluarga Berencana
Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi Bagi Keluarga Miskin dan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon
- 3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub kegiatan Bintek dan Fasilitasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Untuk tabel usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2026 dapatdilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan: 1. Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di	Kab. Taban an	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber- KB (%)		

	Kampung KB 2. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				
2	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kegiatan: 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi Bagi Keluarga Miskin 2 Pengendalia n dan Pendistribusi an Alokon.	Kab. Taban an	Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif		
3	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan: 1. Bintek dan Fasilitasi Kader Bina	Kab. Taban an	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber- KB (%)		



	Keluarga Balita (BKB)				
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan: 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Tabanan	Prosentase Pasangan Usia Subur menikah di atas 21 tahun		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" dengan misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia".

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No. 5 (di dalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi "**Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**", dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR)= 1 pada tahun 2026, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan

sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Lampiran huruf (n) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang KKB;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;
- e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- f. Penyusunan desain Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional;
- i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
- j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR)
- k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- n. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang KB;
- p. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB;
- q. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum dilingkungan BKKBN;

- r. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- s. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN;
- t. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

Dalam upaya untuk mendukung arah kebijakan Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melakukan Program Keluarga Berencana dengan Kegiatan Pelayanan KIE, Pembinaan Keluarga Berencana, Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional dan Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka Kemandirian serta kegiatan Pengendalian Kependudukan yang hasil akhirnya dapat menurunkan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indikatornya adalah Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas,
Indikatornya adalah Persentase keluarga yang telah melaksanakan 8 fungsi keluarga.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berada pada tujuan 1 (satu) yaitu **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)** pada sasaran 5 (lima) yaitu Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kemiskinan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

1. Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dispenduk KB
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Alami
3. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

2. Indikator Sasaran :

1. Nilai LKjIP.
2. Persentase PUS yang menikah diatas 21 tahun.
3. Persentase penurunan keluarga yang tergolong pra KS dan KS1

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 maka penetapan Tujuan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mendukung Tujuan Sasaran RPJMD

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Dinas Pengendallian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 Program :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
- 2. Program Pengendalian Penduduk
- 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Yang terbagi menjadi beberapa kegiatan antara lain:

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Admistrasi Umum perangkat Daerah
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- 5. Pemeliharaan barang Mikik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- 6. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangkaPengendalian Kualitas Penduduk
- 7. Pemetaan Perkiaraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal
- 9. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/(PKB/PLKB)
- 10.Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah kabupaten/Kota
- 11.pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 12.Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 13. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Tabel III.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TABANAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.135.939.400,00							10.546.895.800,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.135.939.400,00							10.546.895.800,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.135.939.400,00							10.546.895.800,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PD	-			100 persen	4.462.767.200,00						-	5.145.295.800,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKUP silahkan ubah	-			75 persen 1 Laporan	5.000.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKUP	-			75 persen	3.556.267.800,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	4.005.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	3.551.267.800,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		4.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKJP	-			75 persen	102.500.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	190.912.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		55.912.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKJP	-			75 persen	20.000.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PEMANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKGP	-			75 persen	571.579.400,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	675.183.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	41.465.500,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	626.663.800,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		626.663.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKGP	-			75 persen	207.420.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	239.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	187.420.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		196.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		43.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta K3 aktif	-			82 %	337.600.000,00						-	270.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	78.200.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Tabanan	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTRUA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	499.024.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Tabanan		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2718 Orang	411.394.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Tabanan		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	35.100.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Tabanan		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase meningkatnya pengertian aparat desa dan PLKB di Kampung KB	-			83 %	130.750.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	-	-	135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kampung	127.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	-		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE KELUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA	-			85 persen	2.658.634.200,00						-	2.638.000.000,00	

				UPU		2024	2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-			1 laporan	360.000.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA	-	480.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				30 Unit	300.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Balita/Balita) yang mendapat pendampingan	-			1 Laporan	2.298.634.200,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	PUS peserta KB aktif	-	2.350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	73.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	PUS peserta KB aktif		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	1.068.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-SOKS-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	PUS peserta KB aktif		1.070.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	1.157.634.200,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-SOKS-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	PUS peserta KB aktif		1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							10.135.939.400,00							10.546.895.800,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja awal pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan pada tahun 2026 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksana program /kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan untuk tahun 2026 bersumber dari dana APBD dan DAK. Besarnya alokasi anggaran per program dan kegiatan untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Alokasi anggaran per program dan kegiatan untuk belanja langsung tahun 2026:

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja						Anggaran tahun 2026
		Capaian		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan		
		Program		Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.724
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%			Nilai LKJIP	90 (A)	6.510.801.000
Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%					5.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	100%	Jumlah dokumen Sakip tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	3.000.000

		tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah dokumen Sakip tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	2.000.000
Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%					4.558519.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN setahun	12 bulan	Nilai LKJIP	90 (A)	4.556.019.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Jumlah dokumen aset tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	2.500.000,.

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen					310.912.000
	Sub Kegiatan komponen Instalasi Listrik dan penerangan Bangunan kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	7.498.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	5.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	18.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	5.000.000

		mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	20.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	75.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 A	5.000.000
Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100%					572.569.000

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	100.000.000
Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%					681.379.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	3.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	41.492.000

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	417.579.500
Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%					70.947.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	187.992.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	19.890.000

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	350.000.000
Program	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%					0
Kegiatan	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun				0
	Sub Penyusunan dan pemanfaatan Grand Disign Pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyusunan dan Pemanfaatan Grand Dising Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	Meningkatnya Keterampilan/Pengetahuan Siswa tentang Kependudukan	10 Kecamatan	0

Kegiatan	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%					259.400.000
	Sub Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat yang mendapatkan Pengetahuan terbaru	10 Kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan data	10 Kecamatan	165.000.000
	Sub Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah DokumenP engolahan dan Pelaporan data pengendali an lapangan dan pelayanan KB	78%	PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat yang mendapatkan Pengetahuan terbaru	10 Kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan data	10 Kecamatan	120.000.000
Program	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA				2.676.938.000
Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pasangan UsiaSubur menjadi Peserta KB Aktif	78%					1.683.631.000

	Sub Keg.Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah jenis sapras yang diadakan	10 Paket			Meningkatnya kualitas pengendalian kependudukan		486.842.000
	Sub kegiatan pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase penyediaan sarana KIE program KKBPK	85%			Meningkatnya kualitas pengendalian kependudukan		36.131.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah jenis sapras yang diadakan	10 Paket			Meningkatnya kualitas pengendalian kependudukan		486.842.000
Kegiatan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB/PLKB yang mendapat penguatan KKBPK	58 orang			Jumlah PKB/PLKB yang berdayaguna		638.400.000
	Sub kegiatan Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang digerakan	83%			Jumlah PKB/PLKB yang berdayaguna		38.400.000

	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat penguatan				Jumlah PKB/PLKB yang mendapat penguatan		600.000.000
Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PUS Miskin yang Mendapat Penguatan	4138 PUS	Jumlah PUS Miskin yang Terlayani KB		Jumlah PUS Miskin yang Terlayani KB		1.158.514.928
	Sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase distribusi alokon	83%			Jumlah PUS Miskin yang Terlayani KB		200.000.000
	Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase distribusi alokon	85%			Jumlah PUS Miskin yang Terlayani KB		818.514.928
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase penurunan jumlah Unmetneed	85%			Jumlah PUS Miskin yang Terlayani KB		70.000.000

	Sub kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase PUS miskin yang terlayani KB	85%					70.000.000
Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Persentase Pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan ber-KB		Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan ber-KB				
	Sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB		Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan ber-KB				565.680.000

Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%					2.702.148.000
Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%					260.000.000
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Cakupan Pasangan Usia Suburmenikah diatas 21 tahun	75%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun		40.000.000.
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75,00%	40.000.000
Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%					133.016.201

	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Jumlah Kader BKB yang mendapat Bintek	10 Kelompok	Cakupan peserta KB Aktif	67%	133.016.201

BAB 5

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berkedudukan sebagai unsur pendukung otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Awal (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai acuan penyusunannya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021 yang berisi pedoman yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Demikian Rencana Kerja Awal (RENJA) Tahun 2026 kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksana program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2026.

Oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas.

Tabanan, 26 Agustus 2025
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan,



Dra. Ni Wayan Mariati, MM
NIP. 19680926 199403 2 008
Pembina Utama Muda (IV/c)